

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2015).
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Benda, Ernst. *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. (Jakarta: RajGrafindo Persada, 2016).
- Fajar, Mukhti N.D. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*. Cetakan ke-1. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Hamilton, Alexander. *The Federalist Papers*. Cetakan ke-1. (The New American Library, 1961).
- Harris, Bede. *Essential Constitutional Law*. Cetakan ke-1. (London: Cavendish Publishing, 2000).
- Ilyas, Amir dan Muhammad Nursal. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. Cetakan ke-1. (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Marwan, Ali. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaanya di Berbagai Negara*. Cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2017).

- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-17. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Natsir, Jufri. et al. *Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana*. (Gowa: Pusaka Almaida, 2021).
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint; Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Pujilestari, Yulita. et al. *Pengantar Hukum Pidana*. (Pamulang: Unpam Press, 2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Sahir, Syafrida H. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke- 1. (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Saleh. et al. *Cara Mencari Keadilan di Mahkamah Konstitusi*. (Sleman: Deepublish Publisher, 2024).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cetakan ke-1. (Bogor: Politeia, 1991).
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-19. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- Suryana. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-1. (Depok: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-1. (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013).
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke- 1. (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Elsam dan HuMA, 2003).
- Yanuar, Tofik. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022).
- Zulfa, Eva A. et al. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama dan Baru)*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023).
- Zurnetti, Aria. et al. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-1. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).

Jurnal

- Ayu, DD dan Rugun Romaida H. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemalsuan Surat Terhadap Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor: 952/PID. B/2019/PN. Jkt. Brt). *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 No. 2 Tahun 2021.
- Ayu, Dian et al. “Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 19 No. 2 Tahun 2022.
- Azhar, Hanif. "Daluwarsa dalam KUHP dan Fiqh Jinayah". *Jurnal Cendekia*. Volume 4 No. 2 Tahun 2018.
- Cita, Ray et al. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. *Journal Publicuho*. Volume 7 No. 1 Tahun 2024.
- Heo, Mazmur P dan Rugun Romaida H. “Kepastian Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Keterangan Tidak Benar atau Menggunakan Surat Palsu sebagai Calon Bupati Pilkada (Studi Kasus di Sabu Raijua Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021). *Jurnal Adigama*. Volume 4 No. 2 Tahun 2021.

- Izaak, Risan. “Penerapan Alasan Penghapusan Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)”. *Jurnal Lex Crimen*. Volume 5 No. 6 Tahun 2016.
- Julyano, Mario et al. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Journal Crepido*. Volume 1 No. 1 Tahun 2019.
- Kaligis, Indah F. “Daluwarsa Penuntutan Pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Jurnal Lex Crimen*. Volume 7 No. 1 Tahun 2018.
- Mukhlis et al., “Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana sebagai Pejabat Publik”. *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 3 No. 2 Tahun 2019.
- Nugrraha, Rivaldi et al. “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR Di Kota Balikpapan”. *Jurnal de Jure*. Volume 14 No. 1 Tahun 2022.
- Setiawan, Dudu W dan Bambang Tri Bawono, “Disparity of Judge’s Decision on Children of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Dps. by Denpasar State Court Decision No.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Dps.” *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 2 No. 4 Tahun 2019.
- Siahaan, Maruarar. “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”. *Jurnal Hukum*. Volume 16 No. 3 Tahun 2009.
- Sihombing, Eka N.A.M. dan Cynthia Hadita. “Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal APHTN-HAN*. Volume 1 No. 1 Tahun 2022.
- Supena, Cecep C. “Tinjauan Historis Tentang Pelaksanaan dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Moderat*, Volume 6 No. 4 Tahun 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).*

Putusan Pengadilan

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2125 K/PDT/1995*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2278 K/Pid/2007.*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2224 K/Pid/2009.*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 PK/Pid/2013.*

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 569/Pid/B/2013/PN. Pdg.*

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid. B/2014/PN. Bks.*

Indonesia. *Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg.*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014.*

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 05/Pid.Pra/2018/PN. Pbr.*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.*

Internet

PressBooks. “Types of Research-Exploration, Description, and Explanation”.

<https://pressbooks.pub/scientificinquiryinsocialwork/chapter/7-1-types-of-research/>., 20 September 2024.

Pusiknas. "Ratusan Dokumen Dilaporkan Palsu Sepanjang September 2021".
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_dokumen_dilaporkan_palsu_sepanjang_september_2021, 20 November 2024.

Pusiknas. "Rata-rata, Tujuh Kasus Pemalsuan Surat Ditangani Polri".
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rata-rata_tujuh_kasus_pemalsuan_surat_ditangani_polri, 20 November 2024.